

KONTESTASI AKSES DALAM FENOMENA “WAR TIKET HAJI” REGULER DI INDONESIA

Rety Reka Merlins^{1)*}, Bunga Kartika²⁾, Siti Nurhayati³⁾, Nur Azizah⁴⁾,
Rosikah⁵⁾, Astin⁶⁾

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: rety.reka@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wacana *war tiket haji reguler* dikonstruksikan serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam membentuk akses masyarakat terhadap layanan haji. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana Michel Foucault yang berfokus pada hubungan antara pengetahuan (*knowledge*), kuasa (*power*), dan praktik sosial dalam produksi suatu wacana. Data penelitian diperoleh dari pemberitaan media daring, dokumen kebijakan penyelenggaraan haji, serta narasi yang berkembang di ruang publik terkait pendaftaran haji reguler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana *war tiket haji reguler* diproduksi melalui interaksi antara regulasi negara, sistem kuota, teknologi pendaftaran, dan narasi publik yang membentuk cara masyarakat memahami akses terhadap ibadah haji. Melalui mekanisme tersebut, kuasa tidak beroperasi secara represif, melainkan secara produktif dengan menghasilkan kategori, aturan, dan praktik yang mengatur perilaku calon jamaah dalam memperoleh nomor porsi haji. Wacana ini sekaligus mereproduksi persepsi mengenai siapa yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mengakses layanan haji dan siapa yang harus menghadapi hambatan dalam proses tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses terhadap ibadah haji bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan merupakan hasil konstruksi diskursif yang dipengaruhi oleh relasi kuasa dalam tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi agama dan studi kebijakan publik, khususnya dalam memahami praktik-praktik kuasa yang bekerja di balik distribusi akses layanan keagamaan.

Kata Kunci: Haji Reguler, Kontestasi Akses, War Tiket Haji, Wacana, Michel Foucault

ABSTRACT

This study aims to analyze how the discourse of regular hajj ticket wars is constructed and how power relations work in shaping public access to hajj services. The research uses a qualitative approach with Michel Foucault's discourse analysis method which focuses on the relationship between knowledge, power, and social practice in the production of a discourse. Research data were obtained from online media reports, policy documents on the implementation of Hajj, and narratives that have developed in the public space related to regular Hajj registration. The results of the study show that the discourse of regular hajj ticket wars is produced through the interaction between state regulations, quota systems, registration technology, and public narratives that shape the way people understand access to hajj. Through this mechanism, the power does not operate repressively, but productively by producing categories, rules, and practices that regulate the behavior of prospective pilgrims in obtaining the number of Hajj portions. This discourse also reproduces perceptions about who is considered to have a greater chance of accessing hajj services and who has to face obstacles in the process. This research shows that access to Hajj is not solely an administrative issue, but is the result of a discursive construction influenced by power relations in the governance of Hajj in Indonesia. The findings of the research are expected to enrich the study of the sociology of religion and the study of public policy, especially in understanding the practices of power that work behind the distribution of access to religious services.

Keywords: Regular Hajj, Hajj Ticket War, Access Contest, Discourse, Power Relations, Michel Foucault

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama mayoritas di Indonesia, yang mewajibkan penganutnya untuk menunaikan ibadah haji (Merlins et al., 2026). Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim bagi yang mampu menunaikannya. Ibadah ini merupakan rukun Islam kelima setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan puasa di bulan suci ramadhan yang harus ditunaikan oleh umat Islam (Suaib, 2008). Pelaksanaan haji dilakukan dengan menjalankan serangkaian ibadah tertentu di Kota Mekah dan beberapa lokasi disekitarnya pada bulan Dzulhijah. Hukum menunaikan haji adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim yang telah baligh, berakal, dan mampu dengan kewajiban hanya sekali seumur hidup (Farhanah, 2016).

Tingginya jumlah umat Islam yang mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji menunjukkan meningkatnya kesadaran mereka terhadap kewajiban ibadah haji. Tanpa adanya kesadaran tersebut, tidak semua Muslim yang telah memenuhi syarat mampu akan melaksanakan ibadah haji (Suaib, 2008). Animo masyarakat muslim Indonesia untuk menjalankan ibadah haji sangat tinggi, terbukti dengan daftar tunggu yang sangat panjang, mencapai 32 tahun lamanya (Wahyudin et al., 2024).

Menurut World Population Review (2021), Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 236 juta jiwa, berada di bawah Pakistan yang memiliki sekitar 240,8 juta jiwa penduduk Muslim. Sebagai salah satu negara dengan jumlah umat Muslim terbesar, pemerintah Indonesia setiap tahun mengirimkan calon jamaah haji ke Tanah Suci. Pada tahun 2024, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 241.000 orang, ditambah tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah. Jumlah tersebut terbagi menjadi 221.720 jemaah haji reguler dan 19.280 jemaah haji khusus (Kurniawan, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pendaftar jamaah haji di Indonesia pada tahun 2024 M/1445 H mencapai 5.219.408 orang. Ketidakseimbangan antara kuota haji yang tersedia dan jumlah pendaftar tersebut menyebabkan para calon jemaah harus bersabar menunggu hingga sekitar 48 tahun

untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji (Kurniawan, 2023).

Kajian mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada aspek kuota, daftar tunggu, serta efektivitas pengelolaan sistem pendaftaran. Penelitian oleh Halim dan Kurniawan, menunjukkan bahwa daftar tunggu haji memiliki pengaruh signifikan terhadap minat pendaftaran jamaah, di mana semakin panjang waktu tunggu, semakin besar pula kebutuhan calon jamaah untuk segera mendaftar demi memperoleh nomor porsi lebih awal. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem kuota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk perilaku sosial masyarakat dalam merespons keterbatasan akses haji (Halim & Kurniawan, 2025).

Selain itu, Putri, Purnamasari, dan Malik, menemukan bahwa kemampuan finansial dan panjangnya daftar tunggu secara simultan memengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar haji, dengan religiusitas sebagai variabel yang memperkuat keputusan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor struktural (kuota dan waiting list) berinteraksi dengan faktor individual dalam menentukan keputusan berangkat haji (Putri et al., 2025).

Kajian lain oleh Kurniawan melalui analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan kuat antara jumlah pendaftar dengan lamanya waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia, di mana ketidakseimbangan antara kuota dan jumlah pendaftar menyebabkan masa tunggu bisa mencapai puluhan tahun (Kurniawan, 2023). Sementara itu, penelitian mengenai pengelolaan kuota oleh instansi Kementerian Agama juga menegaskan bahwa sistem distribusi kuota berbasis regulasi nasional dan data SISKOHAT menjadi instrumen utama dalam pengaturan antrean jamaah haji di tingkat daerah (Amirullah et al., 2025).

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa studi-studi sebelumnya masih dominan membahas aspek kebijakan, minat, dan efektivitas sistem, namun belum secara spesifik mengkaji kontestasi sosial dalam fenomena “war tiket haji reguler” sebagai bentuk perebutan akses di tingkat praktik masyarakat. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan fenomena war tiket haji reguler sebagai fokus analisis untuk memahami bagaimana

kontestasi akses terbentuk dalam proses memperoleh nomor porsi haji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian akses layanan keagamaan serta memperkaya diskursus mengenai haji sebagai arena kontestasi sosial di Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada upaya mengungkap bagaimana wacana "war tiket haji reguler" memproduksi pengetahuan dan praktik sosial tertentu mengenai akses haji. Dalam konteks ini, akses terhadap ibadah haji tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai hasil konstruksi wacana yang membentuk cara masyarakat memandang kuota, antrean, peluang keberangkatan, dan keadilan distribusi layanan. Kajian semacam ini penting karena dapat memperlihatkan bagaimana relasi kuasa bekerja melalui kebijakan, sistem pendaftaran, dan narasi publik mengenai haji, yang pada akhirnya menentukan siapa yang memperoleh akses dan siapa yang harus menunggu lebih lama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur terhadap karya-karya Foucault, tulisan para teoretisi yang mengulas pemikiran sosial Foucault, serta berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan Foucauldian. Melalui proses pengumpulan, penelaahan, dan perbandingan berbagai sumber tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi benang merah yang menggambarkan pandangan sistematis Foucault mengenai konsep kekuasaan. Kerangka pemikiran tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena wacana *war tiket haji* di Indonesia yang muncul sebagai respons terhadap panjangnya antrean keberangkatan haji dan keterbatasan kuota yang tersedia. Dalam perspektif Foucault, wacana *war tiket haji* tidak hanya dipahami sebagai isu administratif dalam pengelolaan kuota haji, tetapi juga sebagai arena kontestasi berbagai kepentingan, pengetahuan, dan praktik kekuasaan. Melalui produksi wacana yang dilakukan oleh pemerintah, media, maupun masyarakat, terbentuk beragam konstruksi makna mengenai keadilan, aksesibilitas, dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pendekatan Foucauldian digunakan untuk mengungkap bagaimana wacana tersebut diproduksi, disebarluaskan, serta digunakan untuk memperoleh legitimasi dalam ruang public (Mudhoffir, n.d.).

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana institusi negara, media, dan sistem administrasi haji menghasilkan pengetahuan tertentu mengenai akses haji. Analisis difokuskan pada bagaimana kuasa bekerja melalui regulasi, sistem kuota, teknologi pendaftaran, dan mekanisme antrean yang membentuk perilaku calon jamaah. Dalam perspektif Foucault, kuasa tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif karena menghasilkan subjek, aturan, dan praktik sosial tertentu (Khan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi Akses dalam Fenomena “*War Tiket Haji*” Reguler di Indonesia

Banyaknya umat Islam yang telah mendaftarkan diri sebagai calon haji menunjukkan tingginya tingkat kesadaran umat Islam terhadap ibadah haji (Suaib, 2008). Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Keterbatasan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi menyebabkan masa tunggu keberangkatan mencapai puluhan tahun di berbagai daerah. Kondisi ini akan menciptakan ruang kontestasi akses di antara masyarakat.

Realitas antrean haji yang semakin panjang telah mendorong lahirnya berbagai alternatif kebijakan dalam tata Kelola penyelenggaraan ibadah haji. Ditengah upaya pemerintah mencari solusi atas persoalan tersebut, muncul wacana penerapan sistem *war tiket haji* yang menawarkan mekanisme berbeda dari system daftar tunggu yang selama ini berlaku. Wacana ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut aspek keadilan, aksesibilitas, serta efektivitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

(<https://analisis.republika.co.id/berita/tdcqfl430/menimbang-wacanawartiket-haji-antara-ijtihad-kebijakan-dan-prinsip-keadilan>)

Fenomena yang populer disebut sebagai “*war tiket haji*” muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan kuota haji yang tersedia setiap tahun. Kondisi ini menyebabkan antrean keberangkatan yang sangat panjang sehingga akses terhadap ibadah haji menjadi arena kompetisi sosial. Nida Farhan menjelaskan bahwa persoalan utama penyelenggaraan haji di Indonesia adalah fenomena *waiting list* yang disebabkan oleh tingginya jumlah pendaftar dan keterbatasan kuota yang diberikan kepada Indonesia. Akibatnya, calon jemaah

harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kesempatan berangkat haji (Farhanah, 2016)

Dalam perspektif Michel Foucault, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai praktik kuasa (*power relations*) yang bekerja melalui mekanisme administrasi negara. Kuota, nomor pors, daftar tunggu, dan sistem pendaftaran merupakan instrumen yang membentuk struktur akses terhadap ibadah haji. Kuasa dalam pandangan Foucault tidak semata-mata bersifat represif, tetapi produktif karena menghasilkan kategori-kategori sosial baru yang mengatur perilaku masyarakat (Foucault, 1980). Dengan demikian, calon jemaah haji tidak hanya menjadi pelaku ibadah, tetapi juga subjek administratif yang harus tunduk pada logika birokrasi negara.

Menurut penelitian Muh. Idham Kurniawan, terdapat hubungan signifikan antara jumlah pendaftar haji dengan panjangnya masa tunggu keberangkatan. Semakin tinggi jumlah pendaftar, semakin panjang pula antrean yang harus dihadapi masyarakat. Realitas ini menunjukkan bahwa akses terhadap haji telah menjadi sumber daya yang langka dan diperebutkan (Kurniawan, 2023).

Birokratisasi Haji dan *Governmentality*

Foucault menggunakan konsep *governmentality* untuk menjelaskan bagaimana negara mengelola populasi melalui berbagai teknik administratif. Dalam konteks penyelenggaraan haji Indonesia, praktik tersebut terlihat melalui sistem kuota, pendataan jemaah, pengaturan keberangkatan, hingga pengelolaan antrean. Penelitian mengenai pembentukan kementerian khusus haji di Indonesia menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji semakin ditempatkan dalam kerangka tata kelola modern yang mengutamakan efisiensi, pengawasan, dan pengendalian populasi jemaah. Haji tidak lagi hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai objek administrasi negara yang harus diatur secara sistematis melalui perangkat birokrasi.

Melalui perspektif Foucault, sistem pendaftaran haji dapat dibaca sebagai bentuk *disciplinary power* yang bekerja melalui pencatatan, klasifikasi, dan normalisasi. Negara mengelompokkan masyarakat berdasarkan nomor pors, usia, status keberangkatan, dan kategori kuota tertentu. Praktik ini menciptakan subjek-

subjek yang patuh terhadap mekanisme birokrasi dan menerima sistem antrian sebagai sesuatu yang normal.

Produksi Wacana War Tiket Haji

Menurut Foucault, realitas sosial dibentuk melalui wacana (*discourse*). Wacana tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga menciptakan cara tertentu dalam memahami kenyataan tersebut. Istilah “*war tiket haji*” merupakan konstruksi diskursif yang menggeser pemahaman masyarakat terhadap ibadah haji. Penggunaan istilah “war” menandakan adanya kompetisi, perebutan, dan kelangkaan akses. Wacana tersebut diperkuat oleh pemberitaan media mengenai panjangnya daftar tunggu, keterbatasan kuota, dan berbagai strategi masyarakat untuk memperoleh kesempatan berangkat lebih cepat.

Istilah “*war tiket haji*” muncul dalam ruang publik Indonesia untuk menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memperebutkan kuota keberangkatan haji. Wacana penerapan system war tiket haji yang digagas Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia dinilai memiliki tujuan positif. Kebijakan ini diharapkan mampu mempersingkat masa tunggu calon jamaah haji yang selama ini sangat Panjang. Namun demikian, gagasan tersebut perlu melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan baru. Terlebih terkait aspek keadilan dan akses bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Dr. Ridho Al Hamdi, S.Fil.I., M.A., dosen ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umy.ac.id/wacana-sistem-war-tiket-haji-perlu-kajian-mendalam/>.

Dr. Ridho Al Hamdi menjelaskan bahwa wacana terkait penerapan system “*war tiket haji*” yang digagas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dinilai memiliki tujuan positif. Kebijakan ini diharapkan mampu mempersingkat masa tunggu calon jamaah haji yang selama ini sangat Panjang. Prinsipnya tujuan dari “*war tiket haji*” ini mencoba untuk meringkas jangka waktu atau masa tunggu calon jamaah haji yang Panjang menjadi lebih pendek. <https://www.umy.ac.id/wacana-sistem-war-tiket-haji-perlu-kajian-mendalam/>

Dalam analisis Foucauldian, bahasa semacam itu menghasilkan *regime of truth* atau rezim kebenaran yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Akibatnya, masyarakat memandang pendaftaran haji bukan lagi sekadar proses administratif menuju ibadah, tetapi sebagai kompetisi untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang terbatas. Menurut Foucault, Bahasa memiliki keterkaitan yang erat dengan realitas, karena berfungsi sebagai sarana untuk membangun dan melegitimasi kebenaran. Bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga berperan dalam mengorganisasi serta membentuk pengetahuan manusia, sehingga selalu beroperasi secara dinamis. Selain itu, Bahasa merupakan bagian dari wacana yang mencerminkan keragaman budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan system pengetahuan suatu masyarakat (Martono, 2014).

Michel Foucault dalam perspektifnya menggambarkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen yang membentuk realitas sosial. Wacana (*discourse*) menghasilkan pengetahuan tertentu yang kemudian dianggap sebagai kebenaran. Ketika media, pemerintah, dan masyarakat menggunakan istilah "war tiket haji", mereka secara tidak langsung membangun konstruksi bahwa keberangkatan haji merupakan sesuatu yang langka, kompetitif, dan harus diperjuangkan melalui persaingan.

KESIMPULAN

Fenomena *war tiket haji reguler* di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap ibadah haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif atau teknis penyelenggaraan layanan keagamaan. Melalui perspektif Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa wacana *war tiket haji* merupakan hasil konstruksi yang dibentuk oleh relasi antara kuasa, pengetahuan, dan regulasi dalam tata kelola haji. Sistem kuota, mekanisme pendaftaran, penggunaan teknologi digital, serta berbagai narasi yang berkembang di ruang publik secara bersama-sama membentuk cara masyarakat memahami, mengakses, dan merespons peluang keberangkatan haji.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam penyelenggaraan haji bekerja secara produktif melalui pembentukan aturan, prosedur, dan kategori yang mengarahkan perilaku calon jamaah. Dalam konteks ini, wacana *war tiket haji*

reguler merefleksikan tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan tata kelola penyelenggaraan haji yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan akses dan transparansi informasi bagi seluruh calon jamaah. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan mengenai praktik-praktik kuasa dalam layanan keagamaan lainnya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, negara, dan masyarakat dalam konteks Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, S., Zaki, K., Islam, U., Fatmawati, N., & Bengkulu, S. (2025). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Efektivitas Pengelolaan Kuota Haji Reguler oleh Kantor Wilayah*. 4(2), 1380–1389.
- Farhanah, N. (2016). *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia Nida Farhanah*. 12, 57–80.
- Halim, S., & Kurniawan, R. (2025). *Pengaruh Kualitas Produk , Pelayanan , dan Daftar Tunggu terhadap Minat Pendaftaran Haji PDSB*. 9–20.
- Khan, T. H. (2021). *Foucauldian Discourse Analysis : Moving Beyond a Social Constructionist Analytic*. 20, 1–9.
<https://doi.org/10.1177/16094069211018009>
- Kurniawan, M. I. (2023). *Penerapan Analisis Korelasi Spearman ' s Rank pada Waiting List Jemaah Haji di Indonesia*. 2(September), 83–94.
- Martono, N. (2014). *DOMINASI KEKUASAAN DALAM PENDIDIKAN : Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan*. 8(1), 28–39.
- Michel Foucault (sumber primer): *The Archaeology of Knowledge* (1972) dan *Power/Knowledge* (1980).
- Merlins, R. R., Abdillah, H., Akbar, M., & Qhuraissy, A. (2026). *Komodifikasi Spiritualitas : Tinjauan Marxis atas Praktik Ekonomi dalam Ibadah Haji*. 6(1), 61–71.
- Mudhoffir, A. M. (n.d.). *Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan bagi Sosiologi Politik*.
- Putri, D. A. L., Purnamasari, F., & Malik, A. (2025). *TERHADAP MINAT HAJI DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. 8(November), 451–462.
- Suaib, M. R. (2008). *Peranan Kementrian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kota Sorong*. 18–28.
- Wahyudin, Y., Hendra, T., & Abdullah, M. (2024). Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji Dan Umrah. *Jurnal Al Ashriyyah*, 10(1), 123–134.